

## **Penerapan Asas Konsensualisme Dan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta Dan CV.Slaco Mandiri Di Kota Batam**

**Yulia Putri Dwiyanti**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[yuliaputri77@gmail.com](mailto:yuliaputri77@gmail.com)

### **Abstrak:**

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri dilakukan untuk pembangunan gedung Rektorat International Batam (UIB). Bentuk surat perjanjian yang digunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *Socio-Legal*. Hasil penelitian dijabarkan dengan cara deskriptif analisis, yaitu penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian dalam hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco melakukan melakukan cara negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah pihak yang dirugikan harus bertanggungjawab atas tindakan wanprestasinya dengan membayar denda ganti rugi. Penerapan asas konsensualisme terwujud pada kesepakatan secara lisan. Sedangkan penerapan asas al-kitabah pada perjanjian tidak diterapkan.

**Kata Kunci:** Asas Konsensualisme, Asas Al-Kitabah, Ganti Rugi, Wanprestasi

### **Pendahuluan**

Perkembangan pembangunan di Indonesia pada saat ini berkembang begitu pesat mengikuti pertumbuhan manusia. Kebutuhan akan tempat tinggal mengakibatkan meningkatnya permintaan pembangunan pada perusahaan jasa di bidang konstruksi. Sebelum pembangunan dikerjakan, wajib terlebih dahulu perusahaan konstruksi sebagai penyedia jasa berkonsultasi dengan penggunanya untuk mendapatkan output yang lebih baik.<sup>1</sup> Perusahaan jasa konstruksi sangat diperlukan dan dominan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena hal tersebutlah perusahaan jasa konstruksi memiliki peran yang cukup tinggi dan sifatnya cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang

---

<sup>1</sup> Aang Alim Murtopo, "Sistem informasi akuntansi proyek pada jasa kontraktor CV. Indah Kiat konstruksi Kab Tegal,"no.1 (2021) : 9-15

<https://jurnal.peradaban.ac.id/index.php/jtikom/article/view/784/606>

## JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Dalam layanan jasa konstruksi ada dua pihak yang melakukan perjanjian kerja yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang atau badan hukum yang memberikan perintah atau pemilik proyek yang menggunakan jasa konstruksi. Penyedia jasa merupakan orang atau badan yang menerima tugas dari pemilik proyek atau menyediakan layanan jasa konstruksi.<sup>3</sup> Adapun lingkup layanan jasa konstruksi dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya yakni meliputi bidang arsitektural, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang sipil, dan bidang tata lingkungan.

Perjanjian Kerjasama dalam bidang jasa konstruksi juga dilakukan oleh PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri dalam rangka pembangunan Universitas Internasional Batam (UIB). PT. Pena Hasta Rekacipta bertindak sebagai pengguna jasa dan CV. Slaco Mandiri bertindak sebagai penyedia jasa. Perjanjian kerjasama tersebut dimuat dalam Surat Perintah Kerja No: 005/SPK/PHR/OUT/II/2016 untuk melaksanakan pekerjaan Desain Gambar Kerja Mekanikal dan Elektrikal Gedung Rektorat Universitas Internasional Batam. Dalam surat perintah kerja tersebut, Ir. Pipin Harahap selaku direktur Utama PT. Pena Hasta Rekacipta memberi tugas kepada CV. Slaco Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Desain Gambar Kerja Mekanikal dan Elektrikal Gedung Rektorat Universitas Internasional Batam dengan harga kontrak pekerjaan sebesar Rp. 130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dalam perjanjian yaitu Surat Perintah Kerja (SPK) sudah tercantum hak dan wajiban dari masing-masing pihak seperti cara Pembayaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yang pertama dilakukan penandatanganan SPK disertai pembayaran sebesar 20%, kedua pada saat gambar IMB diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 30%, ketiga pada saat gambar konstruksi diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 30%, dan keempat pada saat Bill of Quantity diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 20%. Dengan jangka waktu penggeraan atau pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Pada pelaksanaannya terjadi wanprestasi dalam hal proses tahapan pembayaran jasa desain konstruksi Mekanikal dan Elektrikal oleh. PT. Pena Hasta Rekacipta sebagai pihak pengguna jasa telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan menunda pembayaran pada tahapan pembayaran ketiga. Pihak pengguna jasa menunda pembayaran dengan alasan belum adanya dana yang cukup dan berjanji akan melunasinya pada tahap akhir. Dalam kasus tersebut pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan wanprestasi tersebut ingin mengajukan ke jalur hukum tetapi karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama, para pihak sepakat menyelesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam suatu perjanjian, telah melekat beberapa asas yang harus dilakukan jika ingin mengadakan sebuah perjanjian. Salah satu asas yang melekat pada suatu konsep

<sup>2</sup> Violencia C.I. Kondoy, Grace B. nangoi dan Inggriani Elim, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala," Berkala Ilmiah Efisiensi, no. 04 (2016): 170 <https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/bie/article/view/13602>

<sup>3</sup> Dinda Anna Zatika, Hamzah dan Depri Liber Sonata, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk," Pactum Law Journal, no. 3 (2018): 210 <http://repository.lppm.unila.ac.id/9123/>

# JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian dapat dikatakan sah ketika kedua belah pihak telah mengucapkan kata sepakat. Sehingga dengan adanya kata sepakat antara dua pihak, yang kemudian melahirkan sebuah perjanjian.<sup>4</sup> Pada perjanjian menurut hukum islam khususnya asas al-kitabah menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis, ketentuan ini didasarkan Kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283<sup>5</sup> yang artinya mengajarkan bahwa apabila melakukan perjanjian dalam bermuamalah hendaknya ditulis agar perjanjian menjadi lebih kuat.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai permasalahan yang sama dalam hal wanprestasi diantaranya oleh Miftakhul Army Aziz berjudul "*Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)*". Penelitian tersebut membahas tentang adanya tidak wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran.<sup>6</sup> Penelitian oleh Nungki Ekawati berjudul "*Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian tersebut membahas tentang adanya tindakan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pembayaran kontrak sampai akhir.<sup>7</sup> Penelitian oleh Riyandri Nasruloh berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*". Penelitian tersebut membahas tentang adanya tindakan melanggar dari perjanjian dengan tidak mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>8</sup>

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam Kepulauan Riau tepatnya Bengkong Baru No.2. Subjek pada penelitian ini yaitu CV.Slaco Mandiri sebagai narasumber yang memberikan informasi. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian melakukan pendekatan socio-legal dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat dan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan peneliti dengan langsung terjun ke lapangan, untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara terbuka dan terstruktur

<sup>4</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, "Hilangnya Esensi "Persetujuan" dalam jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online", no.1 (2022): 31-32

<http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5882>

<sup>5</sup> Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", no.2 (2013): 354 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026>

<sup>6</sup> Miftakhul Army Aziz, "Tinjauan Hukum (Pendekatan Intergratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30764/>

<sup>7</sup> Nungki Ekawati, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam"( Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), <http://repository.radenintan.ac.id/481/>

<sup>8</sup> Ade Riyandri Nasruloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), [https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10\\_291](https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10_291)

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

# JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

dengan pihak penyedia jasa guna mendapatkan informasi tentang bagaimana proses terjadinya wanprestasi serta penyelesaiannya.

## Hasil dan Pembahasan

### Penyelesaian Sengketa Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri berawal dari adanya penawaran terkait harga dan perancangan desain yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam isi Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak terdapat poin yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa kemudian terjadi sengketa yaitu adanya penundaan pembayaran Penyelesaian dari pelanggaran wanprestasi tersebut kemudian terjadilah negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut terbentuklah perjanjian kerjasama tidak tertulis mengenai sanksi denda sanksi tentang wanprestasi yang dilakukan pihak PT.Pena Hasta Rekacipta. Bentuk dari sanksinya adalah ganti rugi yang harus dibayarkan dan dilunasi pada tahapan pembayaran terakhir. Hal ini sesuai dengan KUHPerdata pasal 1365 menyatakan, “*setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, wajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*”<sup>10</sup>. Penggantian kerugian harus dilaksanakan karena sebagai suatu resiko yang harus ditanggung atas tindakannya. Jika pihak yang lalai tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak tersebut.

Jenis penuntutan ganti rugi dalam sengketa ini adalah ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, dimana pihak penerima tugas meminta denda uang sebesar 10% yang kemudian harus langsung dibayarkan atau lunas sesuai kesepakatan yaitu pada pembayaran tahap terakhir. Penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua belah pihak yaitu dengan cara bernegosiasi. Hal ini tentunya telah melewati tahapan-tahapan penawaran atas biaya ganti rugi.

### Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri

Asas konsensualisme adalah “ruh” dari suatu perjanjian, yang tersimpul dari kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH.Perdata yang menentukan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Kata sepakat atau konsensus merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat merupakan suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidak-tidaknya harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan mempunyai dua kehendak yang saling mengisi.

Pernyataan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian, dibedakan antara pernyataan kehendak yang merupakan penawaran dan pernyataan kehendak yang

---

<sup>10</sup> Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, no. 2 (2013): 113 <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>

## JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

merupakan penerimaan. Suatu penawaran yang diikuti dengan penerimaan itulah yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak atau kata sepakat dianggap terjadi saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran tersebut. Pada hubungan yang bersifat langsung, di mana para pihak saling berhadapan langsung atau hubungan melalui telepon, saat terjadinya perjanjian sangat jelas, karena saat diterimanya penawaran dapat diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan.<sup>11</sup>

Perjanjian terjadi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri dimulai sejak terdapat kesepakatan secara langsung baik pertemuan tatap muka maupun melalui telepon yang kemudian diwujudkan dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja). Namun, dalam kesepakatan tersebut maupun dalam SPK tidak terdapat poin yang menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Selama proses kesepakatan berlangsung para pihak yang sudah sepakat dianggap telah membuat perjanjian dengan menyatakan bahwa penawaran dapat diterima. Perjanjian yang telah dilakukan tentu sah dan dapat berakibat hukum yang mana perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yakni: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.<sup>12</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian keduanya berawal dengan lancar hingga pada proses pembayaran tahapan ketiga pihak terjadi persengketaan dengan tidak melakukan pembayaran tahapan ketiga tersebut. Karena dalam perjanjian tidak mencantumkan tentang penyelesaian sengketanya, para pihak sepakat untuk melakukan negosiasi terkait bagaimana penyelesaian sengketanya dan berakhir dengan kedua belah pihak melakukan kesepakatan ulang. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara CV.Slaco Mandiri dan PT.Pena Hasta Rekacipta yaitu secara lisan. Hasil dari kesepakatan ulang yaitu pihak yang melanggar bertanggungjawab untuk menggantui kerugian dalam bentuk materil sebesar 10%.

Penerapan asas konsensualisme terwujud dalam kesepakatan secara lisan pada penyelesaian sengketa antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri terkait pembayaran sekaligus ganti rugi sebesar 10%. Setelah proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak isi perjanjian kerjasama awal terkait pembangunan gedung rektorat Universitas Internasional Batam (UIB) diselesaikan dengan sempurna.

### **Penerapan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri**

Dalam perjanjian hukum islam terdapat asas al-kitabah (tertulis) yang menyatakan bahwasannya perjanjian harus dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah

<sup>11</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan", no. 2 (2009): 16-17 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/42>

<sup>12</sup> Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar dan Frieda Fania, "Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Persfektif Asas Konsensualisme dalam Berkontrak (suatu telaah normative terhadap instrument payment guarantee)", no. 1 (2020): 45 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6534>

## JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yakni menganjurkan perjanjian non tunai dilakukan secara tertulis untuk menghindarkan dari keraguan.

Perjanjian dengan kesepakatan secara lisan dilakukan karena rasa kepercayaan, hubungan kedekatan, rasa iba dan saling membutuhkan. Hal penting yang seharusnya ada dalam perjanjian menjadi tidak ter-cover karena tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis. Hal penting yang dimaksud adalah bagaimana jika terjadi wanprestasi, ganti rugi, dan cara penyelesaian sengketanya.<sup>13</sup> Tentu hanya dengan rasa kepercayaan tidak bisa menjadi tolak ukur untuk melakukan sebuah perjanjian, Karena pada dasarnya jika ingin melakukan perjanjian dibutuhkan kehati-hatian untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penerapan asas tertulis dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak memuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) mengenai ganti rugi, yang mana seharusnya ketentuan mengenai sanksi-sanksi termuat dalam perjanjian untuk memudahkan jika terjadinya persengketaan di kemudian hari. Hal ini tentu dapat menjadi bukti yang kuat jika akan berlanjut ke pengadilan sebagai bukti bahwa pihak yang melanggar telah lalai dalam kewajibannya.

## Kesimpulan

Penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi yang dilakukan antara CV.Slaco Mandiri dan PT.Pena Hasta Rekacipta terwujud dengan dibuatnya kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Hal ini dalam perjanjian KUHPerdata khususnya asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut diperbolehkan dan sah. Kesepakatan yang dilakukan oleh PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri belum membahas tentang penyelesaian sengketanya, kemudian terjadilah wanprestasi karena wanprestasi tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan ulang terkait penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi terkait untuk biaya ganti rugi dan berakhir dengan kesepakatan mengganti biaya kerugian sebesar 10%. Sedangkan Penerapan asas al-kitabah dalam ganti rugi terwujud dengan para pihak yang melakukan perjanjian tetapi isi dari perjanjian tersebut tidak dituliskan. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan satu sama lain yang mana menentukan jumlah denda dan waktu ganti rugi dilakukan secara lisan.

## Daftar Pustaka

- Aang Alim Murtopo, "Sistem informasi akuntansi proyek pada jasa kontraktor CV. Indah Kiat konstruksi Kab Tegal,"no.1 (2021) : 9-15  
<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jtikom/article/view/784/606>
- Violencia C.I. Kondoy, Grace B. nangoi dan Ingriani Elim, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala," Berkala Ilmiah

<sup>13</sup> Fathinani Baso, Andi Yaqub, Kamaruddin dan Yuniar Ayu Kurnia, "Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun", no.2 (2021): 29. DOI: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244>

## JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

- |   |     |    |         |     |
|---|-----|----|---------|-----|
| Efisiensi,  | no. | 04 | (2016): | 170 |
| <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13602">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13602</a>   |     |    |         |     |
| Dinda Anna Zatika, Hamzah dan Depri Liber Sonata, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk," <i>Pactum Law Journal</i> , no. 3 (2018): 210 <a href="http://repository.lppm.unila.ac.id/9123/">http://repository.lppm.unila.ac.id/9123/</a>   |     |    |         |     |
| Margareta Sevilla Rosa Angelin, "Hilangnya Esensi "Persetujuan" dalam jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online", no.1 (2022): 31-32  |     |    |         |     |
| <a href="http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5882">http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5882</a>   |     |    |         |     |
| Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", no.2 (2013): 354  |     |    |         |     |
| <a href="https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026">https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026</a>   |     |    |         |     |
| Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar dan Frieda Fania, "Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Persfektif Asas Konsensualisme dalam Berkontrak (suatu telaah normative terhadap instrument payment guarantee),   | no. | 1  | (2020): | 45  |
| <a href="http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6534">http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6534</a>   |     |    |         |     |
| Fathinani Baso, Andi Yaqub, Kamaruddin dan Yuniar Ayu Kurnia, "Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun", no.2 (2021): 29. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244">http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244</a>  |     |    |         |     |
| Rosalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan", no. 2 (2009): 16-17   |     |    |         |     |
| <a href="http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/42">http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/42</a>   |     |    |         |     |
| Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", no. 2 (2013): 113   |     |    |         |     |
| <a href="https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp">https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp</a>   |     |    |         |     |
| Miftakhul Army Aziz, "Tinjauan Hukum (Pendekatan Intergratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <a href="http://etheses.uin-malang.ac.id/30764/">http://etheses.uin-malang.ac.id/30764/</a> |     |    |         |     |
| Nungki Ekawati, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Persfektif Ekonomi Islam"( Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), <a href="http://repository.radenintan.ac.id/481/">http://repository.radenintan.ac.id/481/</a>  |     |    |         |     |
| Ade Riyanto Nasruloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018),  |     |    |         |     |
| <a href="https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/10_291">https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/10_291</a>   |     |    |         |     |
| Zainuddin Ali, <i>Metode Penelitian Hukum</i> (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105   |     |    |         |     |